



Better
anyumas



RENCANA STRATEGIS PERALIHAN 2024 – 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas	8
2.1.1 Tugas.....	9
2.1.2 Fungsi.....	9
2.1.3 Struktur Organisasi DPMPTSP.....	10
2.1.4 Uraian Tugas	12
2.2 Sumber Daya DPMPTSP.....	17
2.2.1 Sumber Daya Manusia	17
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset).....	18
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	37
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	42
2.5 Tantangan dan Peluang DPMPTSP.....	42
2.5.1 Tantangan.....	42
2.5.2 Peluang.....	43

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP.....	45
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	
3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM.....	50
3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.....	58

3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	65
3.3.1	Telaahan Rencana Tata Ruang.....	65
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	68
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	69
4.1.1	Tujuan.....	69
4.1.2	Sasaran.....	69
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategi.....	71
5.2	Arah Kebijakan.....	71
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	75
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	91
BAB VII	PENUTUP	
	Penutup.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2	:	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	17
Tabel 2	:	Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2023	17
Tabel 3	:	Kondisi Aset OPD	18
Tabel 4	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra	38
Tabel 5	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perubahan Indikator (Renstra Perubahan)	40
Tabel 6	:	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah OPD	47
Tabel 7	:	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyumas Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI	58
Tabel 8	:	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyumas Berdasarkan Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	65
Tabel 9	:	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyumas Berdasarkan Telaahan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2031	68
Tabel 10	:	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026	71
Tabel 11	:	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	73
Tabel 12	:	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026	79
Tabel 13	:	Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan disejumlah daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah

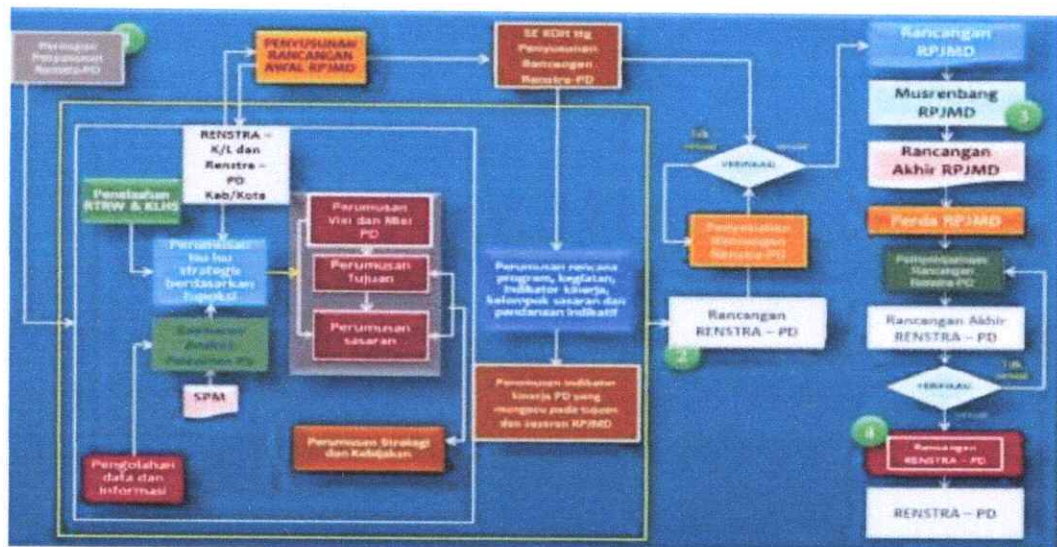
Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan tersebut dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD Peralihan. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra peralihan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Peralihan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Peralihan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kurun waktu Tahun 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPD Peralihan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab II Gambar Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI, telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 serta cascading kinerja dengan masing-masing indikatornya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat daerah, memiliki peran penting dalam urusan pemerintahan bidang Penanaman modal dan perizinan.

Amanat peran tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

2.1.1. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

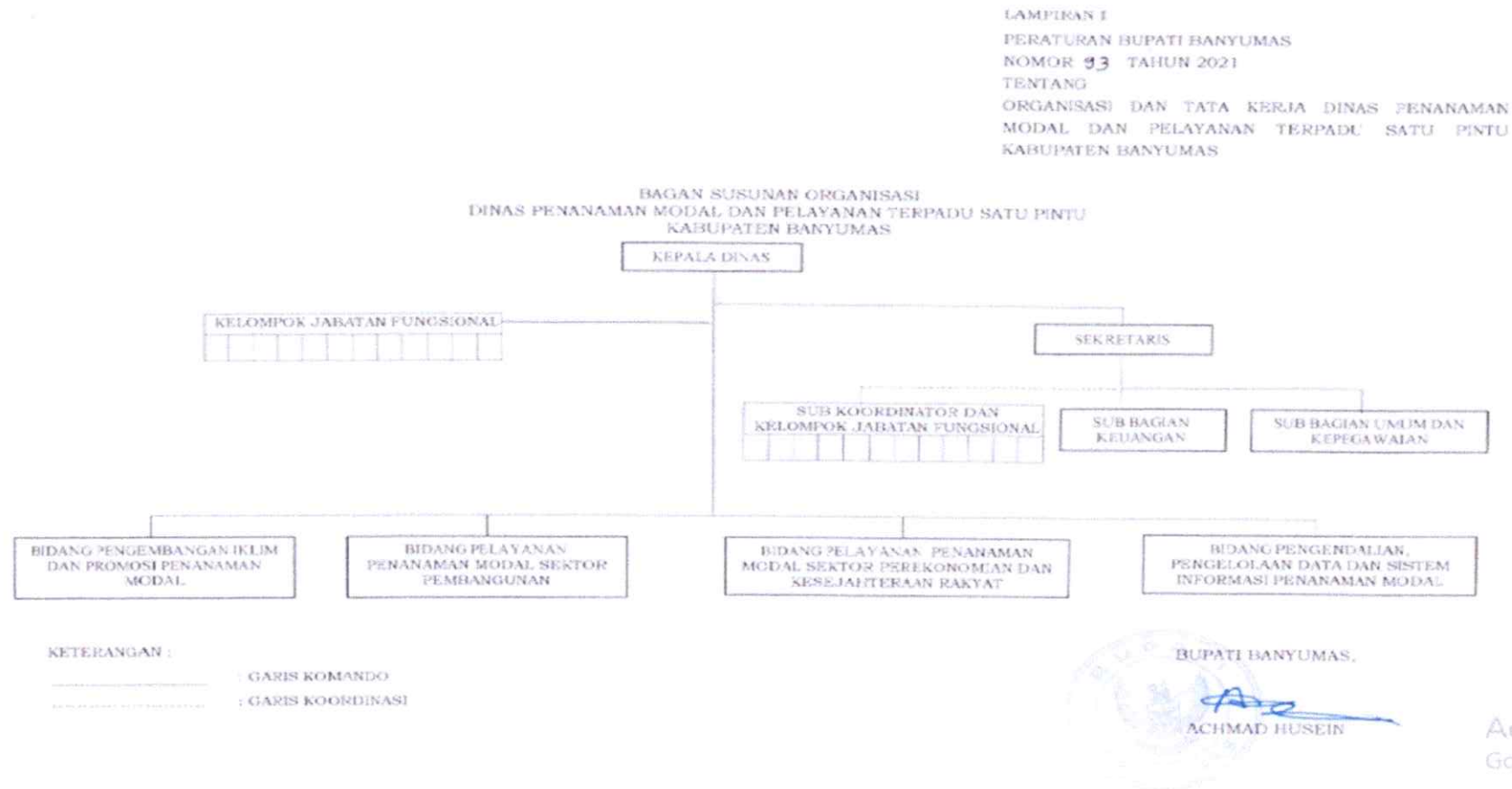
1. Perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan, Bidang Pelayanan Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan, Bidang Pelayanan Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bidang Pelayanan Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Koordinator Perencanaan;
- c. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan;
- e. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional

Gambar 2
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas



Sumber : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas

2.1.4. Uraian Tugas

Uraian tugas dalam struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut :

Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Sekretariat

- 1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan DPMPTSP.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
3. penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan

tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan

5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan

Sub Koordinator Perencanaan

Bertanggung jawab kepada Sekretaris

Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

- 1) Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal adalah unsur pelaksana di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan

teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan

- 1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan adalah unsur pelaksana di Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan penanaman modal sektor pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana di Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang pelayanan penanaman modal sektor perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 1) Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah unsur pelaksana di Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang

Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DPMPSTSP ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap jabatan fungsional mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian jabatan dan promosi sesuai peraturan perundang-undangan.

- 5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- 6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional dan/atau pelaksana diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas.

Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional :

- 1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- 2) Kepala Perangkat Daerah dapat secara langsung mendayagunakan pejabat Fungsional dimaksud diluar tugas tambahannya.
- 3) Penugasan Pejabat Fungsional berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- 4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit kerja pemilik kinerja.

Ketentuan lainnya :

- 1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit kerja.
- 2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.
- 3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
- 4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2023 sebanyak 71 orang, terdiri dari 23 PNS, 8 CPNS dan 40 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 35 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	CPNS	Non PNS	
1	SD	3	-	1	4
2	SMP Sederajat	1	-	1	2
3	SMA Sederajat	7	-	9	16
4	D1	-	-	-	-
5	D3	1	2	6	9
6	S1	6	6	23	35
7	S2	5	-	-	5
8	S3	-	-	-	-
	Jumlah	23	8	40	71

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS dan CPNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 14 orang pada tahun 2023, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	3
2	Golongan II	7
3	Golongan III	15
4	Golongan IV	6

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bappedalitbang Kabupaten Banyumas meliputi peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3
Kondisi Aset OPD

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
1	1320103040 05	1	Generating set (Genset) MPP	2019	Krisbow / Cummins KW 2600914	APBD Kab.	246.500.000
2	1320201010 03	1	Station Wagon	2015	Suzuki / GC415V APV SDX MT(Arena)	APBD Kab.	174.854.400
3	1320201010 03	1	Station Wagon	2016	Toyota / Avanza	APBD Kab.	190.280.000
4	1320201010 03	2	Station Wagon	2007	Toyota / Avanza	APBD Kab.	131.497.000
5	1320201010 03	1	Station Wagon	2017	Toyota / Innova G	APBD Kab.	290.625.532
6	1320201010 03	1	Station Wagon	2007	Toyota Avansa / F602RMGMSF JJ	APBD Kab.	125.500.000
7	1320201010 03	1	Station Wagon	2011	TOYOTA AVANSA / MPNP / STATION WAGON	APBD Kab.	107.400.000
8	1320201040 01	3	Sepeda Motor	2012	Honda / NF11B2D1 M / T	APBD Kab.	11.685.655
9	1320201040 01	4	Sepeda Motor	2012	Honda / NF11B2D1 M /T	APBD Kab.	11.685.655
10	1320201040 01	1	Sepeda Motor	2012	Honda / NF11B2D1 M/T	APBD Kab.	11.685.655
11	1320201040 01	2	Sepeda Motor	2012	Honda / NF11B2D1 M/T	APBD Kab.	11.685.655
12	1320201040 01	1	Sepeda Motor	2010	HONDA / HONDA NF11BID M/T	APBD Kab.	13.014.500
13	1320201040 01	1	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	APBD Kab.	15.672.115

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
14	1320201040 01	2	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	APBD Kab.	15.672.115
15	1320201040 01	1	Sepeda Motor	2015	Yamaha / UE11 (Jupiter Z Fi)	APBD Kab.	14.762.500
16	1320202020 01	1	Sepeda	2009	PHOENIX	APBD Kab.	660.000
17	1320501010 01	1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2013	Brother	APBD Kab.	1.980.000
18	1320501040 01	1	Lemari Kabinet	2003	Brother, Ellite	APBD Kab.	666.700
19	1320501040 02	2	Almari (tempat kunci)	2010	Krisbow / Cummins KW 2600914	APBD Kab.	250.000
20	1320501040 02	1	Almari Alat Dapur	2011	Suzuki / GC415V APV SDX MT(Arena)	APBD Kab.	6.600.000
21	1320501040 02		Almari Arsip Kayu Jati	2010		APBD Kab.	3.750.000
22	1320501040 02	2 - 4	Almari Kayu Jati	2011		APBD Kab.	10.500.000
23	1320501040 02	1	Laci Meja Kasir	2010		APBD Kab.	875.000
24	1320501040 02	3 - 4	Lemari 2 Pintu	2017		APBD Kab.	1.000.000
25	1320501040 02	1	Lemari Berkas	2017		APBD Kab.	31.450.000
26	1320501040 02	2	Lemari Buku Kaca	2004		APBD Kab.	2.150.000
27	1320501040 02	1	Lemari Buku Kaca	2005		APBD Kab.	1.500.000
28	1320501040 02	2	Lemari Buku Kaca	2006		Pembelian	2.900.000
29	1320501040 02	1 - 2	Lemari Buku Kayu Jati	2008		APBD Kab.	4.300.000
30	1320501040 02	1	Lemari File Pegawai	2004		APBD Kab.	1.500.000
31	1320501040 02	1	Lemari File Pegawai	2006		APBD Kab.	1.500.000
32	1320501040 02	1 - 3	Lemari Kayu	2009		APBD Kab.	10.650.000
33	1320501040 02	2	Lemari Server	2017		APBD Kab.	1.200.000
	1320501040	1 - 2	Rak Arsip	2018	DATAFILE	APBD Kab.	6.000.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
	03						
35	1320501040 03	1 - 3	Rak Besi	2006	BROTHER	APBD Kab.	3.000.000
36	1320501040 03	1 - 3	Rak Besi	2014	DATAFILE	APBD Kab.	6.300.000
37	1320501040 03	1 - 4	Rak Besi	2004		Hibah	3.700.000
38	1320501040 03	2	Rak Besi	2006		APBD Kab.	1.500.000
39	1320501040 03	1 - 4	Rak Besi	2011		APBD Kab.	7.400.000
40	1320501040 03	1 - 4	Rak Besi	2010		APBD Kab.	4.800.000
41	1320501040 03	1 - 4	Rak Besi 5 Susun	2008		APBD Kab.	7.400.000
42	1320501040 03	1 - 6	Rak Besi/Metal	2016	BROTHER	APBD Kab.	13.620.000
43	1320501040 03	1 - 3	Rak Besi/Metal	2003		APBD Kab.	750.000
44	1320501040 03	5 - 6	Rak Besi/Metal	2012		APBD Kab.	3.000.000
45	1320501040 03	1 - 4	Rak Besi/Metal	2012		APBD Kab.	6.000.000
46	1320501040 03	1 - 3	Rak Besi/Metal	2015		APBD Kab.	6.930.000
47	1320501040 03	5	Rak Televsi	2008	Safety Gloss	APBD Kab.	700.000
48	1320501040 04	1	Almari (Rak) File Pegawai	2003		APBD Kab.	750.000
49	1320501040 04	4 - 5	Rak Kayu	2003		APBD Kab.	800.000
50	1320501040 04	6	Rak Kayu	2003		Pembelian	300.000
51	1320501040 04	2 - 3	Rak Kayu	2003		APBD Kab.	1.000.000
52	1320501040 04	1	Rak Kembang	2009		APBD Kab.	950.000
53	1320501040 07	1	Brand Kas	2003	Cobra	APBD Kab.	2.500.000
54	1320501040 26	1 - 3	Filling Besi/Metal	2017	Brother / B104	APBD Kab.	8.100.000
55	1320501040 26	1	Filling Besi/Metal	2007	Brother	APBD Kab.	1.500.000
56	1320501040 26	4 - 7	Filling Besi/Metal	2003	Ellite	APBD Kab.	1.200.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
57	1320501040 26	1	Filling Besi/Metal	2012	2 Laci	APBD Kab.	2.000.000
58	1320501040 26	1	Filling Kabinet	2005	Brother	APBD Kab.	1.050.000
59	1320501040 26	1 - 3	Filling Kabinet	2010	Brother	APBD Kab.	5.100.000
60	1320501040 26	1	Filling Kabinet	2014	DATAFILE	APBD Kab.	2.500.000
61	1320501040 26	9	Filling Kabinet	2003	Elite	APBD Kab.	1.750.000
62	1320501040 26	1	Filling Kabinet	2004	Elite	APBD Kab.	1.275.000
63	1320501040 26	1 - 5	Filling Kabinet	2006	Elite	APBD Kab.	5.000.000
64	1320501040 26	1 - 4	Filling Kabinet	2011	VIP	APBD Kab.	6.400.000
65	1320501040 26	1 - 2	Filling Kabinet 4 Laci	2008	Brother	APBD Kab.	7.400.000
66	1320501040 27	1 - 2	Lemari Buku Kaca	2008		APBD Kab.	4.000.000
67	1320501040 29	1 - 3	Almari Arsip Pintu Kaca Geser	2013	Brother	APBD Kab.	7.590.000
68	1320501040 29	8	Almari Arsip Pintu Kaca Geser	2013	Brother	APBD Kab.	2.530.000
69	1320501040 29	1	Kotak Saran	2003		APBD Kab.	350.000
70	1320501040 29	1 - 2	Lemari Arsip Pintu Kaca Geser	2017	IMPORTA	APBD Kab.	5.000.000
71	1320501040 29	4 - 7	Lemari Arsip Pintu Kaca Geser	2013	Brother	APBD Kab.	6.380.000
72	1320501050 03	1	Papan Visuil Elektronik/Digital Moving Sign Besar	2009	Power	APBD Kab.	45.203.000
73	1320501050 05	4	Papan data jenis layanan perizinan	2017		APBD Kab.	864.000
74	1320501050 05	5	Papan data jenis layanan perizinan	2017		APBD Kab.	936.000
75	1320501050 05	1	Papan Struktur Organisasi	2017		APBD Kab.	1.019.000
76	1320501050 05	2 - 3	Papan Struktur Organisasi	2017		APBD Kab.	1.134.000
77	1320501050 05	1	White Board	2012	Brother	APBD Kab.	2.500.000
78	1320501050 05	4	White Board	2003		APBD Kab.	150.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
79	1320501050 05	2	White Board	2003		APBD Kab.	375.000
80	1320501050 05	5 - 6	White Board	2003		APBD Kab.	380.000
81	1320501050 05	1	White Board Komplit	2003		APBD Kab.	800.000
82	1320501050 09	1	Peta Kabupaten Banyumas	2006		APBD Kab.	200.000
83	1320501050 10	1	Alat Penghancur Kertas	2017	Aurora	APBD Kab.	2.700.000
84	1320501050 12	1	Mesin Absensi	2019	PRIMATECH / PF SERIES	APBD Kab.	4.700.000
85	1320501050 12	1 - 2	Mesin Absensi Wajah	2018	Solution	APBD Kab.	8.400.000
86	1320501050 12	1	Mesin Absensi Wajah	2014	Face Ditection	APBD Kab.	4.200.000
87	1320501050 77	3	Papan Maklumat	2018	Brother	APBD Kab.	2.061.000
88	1320501050 77	2	Papan Pengumuman	2018	Ellite	APBD Kab.	800.000
89	1320501050 77	1	Papan Pengumuman	2018		APBD Kab.	1.200.000
90	1320501050 88	1 - 3	Baliho	2009		APBD Kab.	44.210.500
91	1320501050 88	1	Barcode	2015		APBD Kab.	2.948.000
92	1320501050 88	3	GPS	2015		APBD Kab.	7.507.500
93	1320501050 88	2	Mesin Antrian	2015		APBD Kab.	60.115.000
94	1320501050 88	1	Neon Box 2 Muka + Tiang	2006		APBD Kab.	8.000.000
95	1320501050 88	1 - 2	Sidik Jari Absensi	2019	Solution / digital/Person a	APBD Kab.	2.560.000
96	1320502010 02	4 - 13	Kursi Biasa Kayu	2008		APBD Kab.	5.000.000
97	1320502010 02	1 - 3	Kursi Dengan Sandaran Tangan	2003		APBD Kab.	900.000
98	1320502010 02	1	Kursi Dengan Sandaran Tangan	2004		APBD Kab.	300.000
99	1320502010 02	1	Meja Locket	2006		APBD Kab.	7.000.000
10 0	1320502010 05	1 - 2	Zice	2003		APBD Kab.	300.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
10 1	1320502010 08	1	Meja Rapat	2018	Multiplek finished HPL / Multiplek finished HPL	APBD Kab.	5.000.000
10 2	1320502010 08	4 - 8	Meja Rapat	2003		APBD Kab.	2.500.000
10 3	1320502010 08	1 - 3	Meja Rapat	2003		APBD Kab.	2.250.000
10 4	1320502010 08	1 - 3	Meja Rapat Bahan Kayu Jati	2005		APBD Kab.	3.750.000
10 5	1320502010 08	1	Meja Rapat Pimpinan	2017	- / -	APBD Kab.	4.800.000
10 6	1320502010 12	1	Meja Telpon	2006		APBD Kab.	575.000
10 7	1320502010 13	1	Meja Podium	2015		APBD Kab.	3.410.000
10 8	1320502010 14	1	Meja Resepsionis	2018	Multiplek finished HPL / Mutiplek finished HPL	APBD Kab.	5.500.000
10 9	1320502010 17	1 - 2	Kursi Roda	2018	Standart / GEA FS 872	APBD Kab.	2.400.000
11 0	1320502010 22	1	Baby Tafel	2019		APBD Kab.	3.410.000
11 1	1320502010 24	8 - 15	Meja	2003		APBD Kab.	3.666.800
11 2	1320502010 24	1 - 2	Meja	2004		APBD Kab.	1.200.000
11 3	1320502010 24	1 - 4	Meja Kerja	2005		APBD Kab.	2.400.000
11 4	1320502010 24	1 - 3	Meja Kerja Biro Sedang	2008		Pembelian	8.100.000
11 5	1320502010 24	4 - 14	Meja Kerja Setengah Biro	2008		APBD Kab.	10.450.000
11 6	1320502010 25	1 - 2	Kasur/Spring Bed	2021	Royal / Dobel	APBD Kab.	7.917.000
11 7	1320502010 30	1 - 5	Kursi Kerja/Rapat	2009	FUTURA	APBD Kab.	1.550.000
11 8	1320502010 30	1 - 3	Kursi Rapat	2007	Chitose	APBD Kab.	1.080.000
11 9	1320502010 30	2 - 5	Kursi Rapat	2005	futura	APBD Kab.	1.000.000
12 0	1320502010 30	1 - 20	Kursi Rapat	2010	futura	APBD Kab.	6.175.000
12 1	1320502010 30	1 - 40	Kursi Rapat	2019	Rapat / Rapat	APBD Kab.	37.200.000
12 2	1320502010	1 - 25	Kursi Rapat	2018	Rapat	APBD Kab.	21.125.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
	30						
12 3	1320502010 30	1 - 15	Kursi Rapat	2003		APBD Kab.	3.000.000
12 4	1320502010 31	1 - 3	Kursi Tamu	2015		APBD Kab.	9.075.000
12 5	1320502010 31	2	Kursi Tamu Sudut	2017	L	APBD Kab.	2.690.000
12 6	1320502010 31	1	Kursi Tamu Sudut	2018	L	APBD Kab.	2.740.000
12 7	1320502010 31	1	Meja dan Kursi Tamu	2017	L	APBD Kab.	5.500.000
12 8	1320502010 32	2 - 4	Kursi Menejer	2018	Putar	APBD Kab.	5.400.000
12 9	1320502010 32	1	Kursi Pejabat / Direktur	2018	Putar	APBD Kab.	1.900.000
13 0	1320502010 32	1 - 11	Kursi Putar	2017	Brother / Direktur	APBD Kab.	14.300.000
13 1	1320502010 32	1 - 4	Kursi Putar	2015		APBD Kab.	11.550.000
13 2	1320502010 33	1 - 4	Kursi Biasa Kayu Jati	2005		APBD Kab.	72.000
13 3	1320502010 33	1 - 3	Kursi Biasa/Kerja	2004		APBD Kab.	525.000
13 4	1320502010 33	13 - 15	Kursi Kerja Biasa	2003		APBD Kab.	737.400
13 5	1320502010 35	1 - 2	Bangku Tunggu	2003		APBD Kab.	700.000
13 6	1320502010 36	1 - 28	Kursi Lipat	2006	Phoenix / Lipat	APBD Kab.	4.200.000
13 7	1320502010 39	1	Meja Komputer	2003	Paradise	APBD Kab.	50.000
13 8	1320502010 39	1 - 6	Meja Komputer	2005	Pro Design	APBD Kab.	1.650.000
13 9	1320502010 39	1	Meja Komputer	2006	Pro Design	APBD Kab.	500.000
14 0	1320502010 39	1 - 3	Meja Komputer	2008	Pro Design	APBD Kab.	1.500.000
14 1	1320502010 39	1	Meja Komputer	2009	Pro Design	APBD Kab.	1.500.000
14 2	1320502010 39	2	Meja LCD	2011	Callisto	Pembelian	550.000
14 3	1320502010 39	1	Meja Telepon	2011	Melody/Furnit ure	APBD Kab.	600.000
14 4	1320502010 48	1 - 75	Sofa	2018	- / -	APBD Kab.	60.000.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
14 5	1320502010 48	1	Sofa	2019	Custom / Minimalis	APBD Kab.	4.950.000
14 6	1320502010 48	2 - 3	Sofa MPP	2019	TROPPIIS / Cushion Covered Oscar C	APBD Kab.	8.998.000
14 7	1320502010 50	1 - 2	Almari Besi 2 pintu	2014	DATAFILE	APBD Kab.	4.300.000
14 8	1320502010 50	3 - 4	Almari Besi pintu sorong kecil	2014	DATAFILE	APBD Kab.	4.000.000
14 9	1320502010 50	1	CCTV TV Set	2017	HIKVISION /	APBD Kab.	8.110.000
15 0	1320502010 50	2	Etalase/Sketsel	2001	H.264LinuxE mbeddedDV R	APBD Kab.	34.082.090
15 1	1320502010 50	5 - 8	Hardisk External	2003		APBD Kab.	3.400.000
15 2	1320502010 50	1	Karpet	2018	GoFlex	APBD Kab.	3.850.000
15 3	1320502010 50	2	Korden Vertical Blinds	1992	Troppis	APBD Kab.	633.600
15 4	1320502010 50	1	Korden Vertikal Blind	2009	Onna Biru / Vertical Blinds	APBD Kab.	18.326.976
15 5	1320502010 50	1	Korden Vertikal Tipe Blind	2017	- / Blind	APBD Kab.	19.550.000
15 6	1320502010 50	4 - 53	Kursi Hadap Pemohon	2018	Hadap	APBD Kab.	25.000.000
15 7	1320502010 50	54 - 109	Kursi Petugas	2018	Petugas	APBD Kab.	47.320.000
15 8	1320502010 50	1 - 3	Kursi Tunggu	2013	IMPORTA	APBD Kab.	5.460.000
15 9	1320502010 50	7	Lemari Dapur	2019	TROPPIIS	APBD Kab.	23.292.500
16 0	1320502010 50	1	Lemari Loker / Besi	2012	BROTHER	APBD Kab.	2.200.000
16 1	1320502010 50	6	Loker	2019	TROPPIIS	APBD Kab.	39.216.100
16 2	1320502010 50	111	Meja Biding	2018	- / Multiplek finshed HPL	APBD Kab.	2.000.000
16 3	1320502010 50	112	Meja Kerja Kepala	2018	Multiplek finished HPL / Multiplek finished HPL	APBD Kab.	4.500.000
16 4	1320502010 50	2	Meja Kulkas	2019	- / -	APBD Kab.	1.870.000
16 5	1320502010 50	3	Multi Informasi Display (MID)	2019	TREMENDO / DISPLAY	APBD Kab.	63.580.000
16 6	1320502010	1 - 3	My Screen Motorize Metal	2018		APBD Kab.	18.481.200

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
	50		Case Model Focus VS 150				
16 7	1320502010 50	110	Sistem Antrian Otomatis (Tonuchscreen)	2018	Controller & Display Mtr.	APBD Kab.	35.750.000
16 8	1320502010 50	5	Sofa Difabel	2019	TROPPIIS / Tunggu	APBD Kab.	13.200.000
16 9	1320502010 50	5	Tempat Koran Bahan Kayu	2014		APBD Kab.	500.000
17 0	1320502010 50	2	Touc Screen	2011	K105K	APBD Kab.	47.500.000
17 1	1320502010 50	4	TV Touchscreen	2019	Samsung / Signage	APBD Kab.	97.020.000
17 2	1320502020 01	1	Jam Dinding	2008	Seiko	APBD Kab.	285.000
17 3	1320502020 01	1 - 2	Jam Dinding	2005	SEIKO OKA 327 BE	Pembelian	200.000
17 4	1320502020 01	1	Jam Dinding	2019		APBD Kab.	700.000
17 5	1320502030 01	1	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2015	Modena / 1500	APBD Kab.	1.306.800
17 6	1320502030 03	1	Mesin Potong Rumput	2012	BM-7A / CJ6	APBD Kab.	2.500.000
17 7	1320502040 01	1	Lemari Es	2019	MIDEA / HS	APBD Kab.	1.350.000
17 8	1320502040 01	1	Lemari Es	2015	Panasonic	APBD Kab.	1.826.000
17 9	1320502040 03	1 - 2	AC	2011	Panasonic	APBD Kab.	14.500.000
18 0	1320502040 03	1	AC 1 PK	2005	Panasonic	APBD Kab.	4.475.000
18 1	1320502040 03	1 - 2	AC 1 PK	2006	Panasonic	APBD Kab.	8.500.000
18 2	1320502040 03	1 - 2	AC 1 PK	2003	Toshiba	APBD Kab.	10.500.000
18 3	1320502040 03	3	AC 2 PK	2003	Toshiba	APBD Kab.	8.750.000
18 4	1320502040 03	1 - 2	AC Kapasitas 1 PK	2008	Panasonic	APBD Kab.	7.000.000
18 5	1320502040 03	1	AC Unit	2019	Panasonic / LN 12 UKJ	APBD Kab.	5.650.000
18 6	1320502040 03	1 - 3	AC Unit	2007	Panasonic	Pembelian	10.500.000
18 7	1320502040 03	1	AC Unit	2017	Sharp / 09 SSY	Pembelian	4.068.635

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
18 8	1320502040 03	1 - 2	AC Unit	2016	Sharp	APBD Kab.	7.000.000
18 9	1320502040 03	1 - 2	AC Unit/ Pendingin Ruangan	2018	Sharp / 09 UCY	APBD Kab.	8.800.000
19 0	1320502040 04	1 - 5	AC Split	2020	Daikin / PTV35CXV	APBD Kab.	39.000.000
19 1	1320502040 04	1 - 15	Pendingin Ruangan (AC)	2018	MIDEA / AC Split	APBD Kab.	142.500.000
19 2	1320502040 04	1	Pendingin Ruangan (AC)	2019	MIDEA / MFGB_18CRN 1	APBD Kab.	8.200.000
19 3	1320502040 06	1 - 2	Kipas Angin	2011	Panasonic	APBD Kab.	1.200.000
19 4	1320502040 15	10	Air Cooler	2019	Kris / 35	APBD Kab.	999.900
19 5	1320502040 15	6 - 9	Air Curtain	2019	Gree / FM	APBD Kab.	18.800.000
19 6	1320502040 15	1 - 5	Pendingin Ruangan (AC) Standing AC	2019	MIDEA MFGB- 24CRN1 /	APBD Kab.	78.750.000
19 7	1320502060 02	1	Televisi	2020	Floor Stand AC	APBD Kab.	31.000.000
19 8	1320502060 02	2	Televisi	2019	Sony / Led TV 65 x 800 G	APBD Kab.	5.100.000
19 9	1320502060 02	1	Televisi LED 60 Inchi	2018	TOSHIBA / Wall Braket Dolphine 40- 50"	APBD Kab.	23.380.000
20 0	1320502060 02	1	TV LED	2019	Sharp / Flexsible Wall Braket TV	APBD Kab.	48.510.000
20 1	1320502060 02	2 - 4	TV LED 40 Inch	2018	Sony Bravia / Bravia	APBD Kab.	13.800.000
20 2	1320502060 05	1	Portable Wireless Amplifier	2009	TOSHIBA / TOSHIBA	APBD Kab.	3.200.000
20 3	1320502060 07	4 - 7	Coloum Speaker	2019	TOA / ZWG 10AS	APBD Kab.	3.800.000
20 4	1320502060 07	6 - 15	Compact Speaker	2018	TOA / ZS102C	APBD Kab.	10.500.000
20 5	1320502060 07	8 - 9	Compact Speaker	2019	30W / ZS1030	APBD Kab.	1.650.000
20 6	1320502060 07	1 - 3	Loudspeaker (Horn)	2019	TOA / ZS1030	APBD Kab.	2.250.000
20 7	1320502060 08	1	Salon Meeting Portable Noise	2019	TOA / ZH615M	APBD Kab.	2.000.000
20 8	1320502060	1	Wirelles	2012	NOISE / Meeting	APBD Kab.	2.500.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
	12				Portable		
20 9	1320502060 14	1	Chime Microphone	2018	USB/ SD Record FM	APBD Kab.	1.700.000
21 0	1320502060 14	1 - 5	Desk Geosnect Microphone (Mic Meja)	2019	ZM100EC	APBD Kab.	4.300.000
21 1	1320502060 21	11 - 16	IR Camera Bullet	2018	TOA / ZM390	APBD Kab.	5.340.000
21 2	1320502060 21	1 - 10	IR Camera Dome	2018	CCTV HD / DS9066TI	APBD Kab.	8.600.000
21 3	1320502060 23	1	Foto Tustel	2003	CCTV HD / DS9056TI	APBD Kab.	3.458.000
21 4	1320502060 28	1	Lambang Garuda Pancasila	2003	Nixon	APBD Kab.	50.000
21 5	1320502060 29	1	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2003		APBD Kab.	50.000
21 6	1320502060 32	1	Tiang Papan Petunjuk Arah	2018		APBD Kab.	2.500.000
21 7	1320502060 34	1 - 2	Alat Ukur Kepuasan Masyarakat	2018		APBD Kab.	9.000.000
21 8	1320502060 36	1	Tangga Alumunium	2008	Ukur	APBD Kab.	850.000
21 9	1320502060 37	1	Kaca Hias	2003	Fortuna	APBD Kab.	50.000
22 0	1320502060 37	1	Kaca Hias	2005		APBD Kab.	50.000
22 1	1320502060 38	1	Dispencer	2018		APBD Kab.	925.000
22 2	1320502060 38	1	Dispencer	2014	Denpo / DDK 1105	APBD Kab.	1.714.900
22 3	1320502060 38	1	Dispencer	2017	Low Watt Denpo DDK- 1105	APBD Kab.	1.000.000
22 4	1320502060 38	1 - 5	Dispencer	2019	Miyako / Sedang	APBD Kab.	4.448.500
22 5	1320502060 38	2	Dispencer	2018	Miyako / WOP. 200H	APBD Kab.	836.500
22 6	1320502060 38	1	Dispencer	2010	SANKEN	APBD Kab.	1.500.000
22 7	1320502060 38	1	Dispenser	2022	ARISA / BWD- 1ZL / WD- 0811B	APBD Kab.	1.750.500
22 8	1320502060 48	1	Handy Cam Sony	2008	Sony	APBD Kab.	9.300.000
22 9	1320502060	1	Handycam	2011	Sony	APBD Kab.	6.500.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
	48						
23 0	1320502060 77	6 - 10	Alat Pengharum Ruangan MPP	2019	Ecocare / LCD	APBD Kab.	3.300.000
23 1	1320502060 77	1	Antena Parabola KU Band	2017	SKYBOX	APBD Kab.	600.000
23 2	1320502060 77	1	Aqua Galon	2003		APBD Kab.	75.000
23 3	1320502060 77	3 - 6	Free HP Charger	2018	Panasonic	APBD Kab.	14.500.000
23 4	1320502060 77	1	Generator Diesel HD25KVA Silent Cum Gross Weight 1300 Kg, Dimension.	2018	Silent / Dimension 220X105X18C m	APBD Kab.	177.638.000
23 5	1320502060 77	3	Gorden Ruang Laktasi	2017		APBD Kab.	780.900
23 6	1320502060 77	4	Kitchen Set	2017		APBD Kab.	10.340.000
23 7	1320502060 77	7 - 12	Korden	2018	Vertical Blind	APBD Kab.	30.000.000
23 8	1320502060 77	1	Meteran Jalan	2011	Walking Measure	APBD Kab.	725.000
23 9	1320502060 77	2	Papan Nama Kantor	2018	- / -	APBD Kab.	39.700.000
24 0	1320502060 77	4 - 5	Poster Bening Akrilik Area Bebas Rokok	2019		APBD Kab.	1.000.000
24 1	1320502060 77	1	Tape Mobil	2014	Head Unit Roger GPS	APBD Kab.	5.400.000
24 2	1320502060 77	3	Tralis Ruang Rapat 3 MPP	2019		APBD Kab.	6.900.000
24 3	1320502060 77	1	Tralis Tangga Selatan MPP	2019		APBD Kab.	4.270.000
24 4	1320502060 77	2	Tralis Tangga Utara MPP	2019		APBD Kab.	9.330.000
24 5	1320502060 77	13	Troli Arsip	2018		APBD Kab.	1.136.000
24 6	1320502060 77	1	Troly/ Foldable Handtruck 300 Kgsmall	2015	Krisbow	APBD Kab.	513.000
24 7	1320502060 77	2	Vertical Blind	2017		APBD Kab.	2.219.100
24 8	1320502070 01	1	Alat Pemadam Kebakaran	2004	Guardall	APBD Kab.	850.000
24 9	1320502070 01	1 - 3	Alat Pemadam/Portabl e	2012	GUNNEBO / Ultima ABC- 90 Powder	APBD Kab.	4.500.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
25 0	1320503010 06	1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2017		APBD Kab.	3.400.000
25 1	1320503010 09	1 - 2	Meja Kerja	2009		APBD Kab.	4.902.000
25 2	1320503010 09	1 - 3	Meja Kerja Loker & Meja Komputer	2007		APBD Kab.	7.950.000
25 3	1320503030 09	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon	2003		APBD Kab.	300.000
25 4	1320503030 09	1 - 10	Kursi Rapat Pejabat	2018	DUMA INDONESIA	APBD Kab.	15.000.000
25 5	1320503060 13	1	Meja Kursi Tamu	2005		APBD Prov.	3.000.000
25 6	1320601010 05	1	Mixer Amplifier	2018	ZA2240	APBD Kab.	4.200.000
25 7	1320601010 16	1	DVD Player	2018		APBD Kab.	600.000
25 8	1320601010 36	1	Wireless Microphone	2018	Crimson	APBD Kab.	700.000
25 9	1320601010 48	1 - 5	APS UPS SMC1000I	2018	APC / SMC1000I	APBD Kab.	29.500.000
26 0	1320601010 48	3	Unintemuptible Power Supply (UPS) + Stabilizer	2009		APBD Kab.	1.700.000
26 1	1320601010 59	2	Mixer Amplifier	2019	TOA / ZA230	APBD Kab.	925.000
26 2	1320601010 59	1	Power Amplifier	2019	TOA / ZA2120	APBD Kab.	2.875.000
26 3	1320601010 71	1	Tape Mobil	2014		APBD Kab.	4.000.000
26 4	1320601010 96	2 - 3	Camera Digital	2019	Canon / EOS M100	APBD Kab.	16.400.000
26 5	1320601010 96	1 - 3	Epson Projector EB-W05	2018	EPSON / EB- W05	APBD Kab.	21.561.000
26 6	1320601010 96	4	Layar LCD Proyektor	2019	Brite Motorized / MR-2121	APBD Kab.	4.400.000
26 7	1320601010 96	1	LCD Projector + Layar Motorize 70"	2014	Focus / XGA Resolution, 2700 lumens	APBD Kab.	10.750.000
26 8	1320601010 96	1	Video Mikro Rode Microphone	2019	Rode / Microphone	APBD Kab.	900.000
26 9	1320601020 03	1 - 3	Camera Digital	2011	Sony	APBD Kab.	16.500.000
27 0	1320601020 03	1	Camera Electronic	2012	DX Format Digital SLR	Pembelian	18.500.000
27 1	1320601020 11	1	Central DVR Unit 16 Channel	2018	HD / DS7216	Pembelian	2.700.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
27 2	1320601020 38	1	Centralized Power Supply	2018	Box	Pembelian	700.000
27 3	1320601021 64	1	Kamera Digital	2014	SONY / Exmor R Cmos sensor, 18,2 MP	Pembelian	3.000.000
27 4	1320602010 01	1	Telephone (PABX)	2019	Panasonic / KX-NS300	APBD Kab.	15.550.000
27 5	1320602010 03	1	Pesawat Telephone Digital proprietary	2019	Panasonic / KT-DT453X	APBD Kab.	7.375.000
27 6	1320602010 03	2 - 26	Pesawat Telephone Single Line	2019	Panasonic / KX-T825	APBD Kab.	15.375.000
27 7	1320602010 10	1 - 3	Faksimile	2018	Panasonic / KX-FT983	APBD Kab.	7.500.000
27 8	1320602010 10	1	Mesin Facsimile	2005	Panasonic	APBD Kab.	2.000.000
27 9	1320602010 22	1	Global Positioning System (GPS)	2013	GARMIN	APBD Kab.	5.280.000
28 0	1320602010 22	1	PABX	2008		APBD Kab.	11.250.000
28 1	1320803010 03	19 - 20	Papan Akrilyc "Jadwal Layanan MPP"	2019	- / -	APBD Kab.	1.550.000
28 2	1320803010 03	2 - 18	Papan Akrilyc Siluet Bawor "Jenis Layanan"	2019	- / -	APBD Kab.	13.175.000
28 3	1320803010 03	1	Papan Penunjuk Arah Dan Penunjuk Ruangan	2019	- / -	APBD Kab.	5.923.900
28 4	1320803050 66	1	Termos Air Panas	2018	Water Jug / VM-1400 wj	APBD Kab.	517.500
28 5	1320803050 66	2	Termos Air Panas	2018		APBD Kab.	510.000
28 6	1320803090 04	1	Alat Peraga Edukasi Playmat	2019	Labeille / -	APBD Kab.	1.300.000
28 7	1320803090 04	1	Alat Peraga Edukasi Playmat	2018		APBD Kab.	1.906.200
28 8	1321001020 01	1 - 2	Computer HP PC AIO	2019	HP / PC AIO HP 22 C0033D	APBD Kab.	17.600.000
28 9	1321001020 01	3 - 8	HP AIO 24-f0051d (3JV73AA) [3JV73AA]	2018	HP / 24- f0051d (3JV73AA)	APBD Kab.	75.224.880
29 0	1321001020 01	1 - 6	Personal Computer Unit (PC)	2014	ACER / Intel Core i3-3240 Processor	APBD Kab.	39.000.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
29 1	1321001020 01	1 - 2	Personal Computer Unit (PC)	2017	Asus / All in One PC EETOP A4320	APBD Kab.	15.600.000
29 2	1321001020 01	1 - 7	Personal Computer Unit (PC)	2016	HP / All in One 20-C024L	APBD Kab.	47.425.000
29 3	1321001020 01	7 - 9	Personal Computer Unit (PC)	2014	Lenovo / Workstation E 31	APBD Kab.	39.567.525
29 4	1321001020 01	1	Personal Computer Unit (PC)	2012	LG / Core i5- 2310 (2,9GHz,6MB)	APBD Kab.	7.500.000
29 5	1321001020 01	1	Personal Computer Unit (PC)	2013	SAMSUNG	APBD Kab.	7.700.000
29 6	1321001020 01	4	Personal Computer Unit (PC) AIO	2019	HP / 24- F0051D	APBD Kab.	12.000.000
29 7	1321001020 01	3	Personal Computer Unit (PC) AIO	2019	HP / AIO 22- C0053D	APBD Kab.	12.000.000
29 8	1321001020 01	1 - 2	Personal Computer Unit (PC) All In One	2018	HP / 20- C301L	APBD Kab.	15.980.000
29 9	1321001020 02	1 - 2	Lap Top	2017	Acer E5-475G	APBD Kab.	12.800.000
30 0	1321001020 02	5	Lap Top	2019	ASUS / TP 412	APBD Kab.	17.000.000
30 1	1321001020 02	1 - 2	Lap Top	2018	ASUS / X441UV	APBD Kab.	14.400.000
30 2	1321001020 02	2	Lap Top	2015	ASUS / X455L	APBD Kab.	6.900.000
30 3	1321001020 02	1	Lap Top	2015	ASUS / X455L	APBD Kab.	6.900.000
30 4	1321001020 02	3 - 4	Lap Top	2019	HP / 14S- CF0069TX	Pembelian	15.800.000
30 5	1321001020 02	1 - 2	Lap Top	2019	HP / 14S- CF0070TX	Pembelian	15.800.000
30 6	1321001020 02	1 - 2	Lap Top	2020	Lenovo / 5340-0T19 Antivirus	APBD Kab.	16.000.000
30 7	1321001020 02	1 - 2	Lap Top / Note Book	2014	ACER / Intel Core i3-3240 Processor	APBD Kab.	15.600.000
30 8	1321001020 02	3 - 4	Lap Top Asus X441	2018	Asus / X441	APBD Kab.	11.400.000
30 9	1321001020 03	1 - 2	Laptop	2011	Dell	APBD Kab.	20.900.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
31 0	1321001020 03	3 - 5	Note Book	2014	ACER / E5- 471-4005	APBD Kab.	22.950.000
31 1	1321001020 03	1	Note Book	2010	Acer 4741	APBD Kab.	7.500.000
31 2	1321001020 03	1 - 2	Note Book	2016	HP / 14- ac186TU	APBD Kab.	11.500.000
31 3	1321001020 03	2	Note Book	2018	HP Business / 240 G6	Pembelian	10.757.000
31 4	1321001020 03	4 - 6	Note Book	2011	Toshiba	APBD Kab.	22.500.000
31 5	1321001020 03	6 - 8	Note Book	2014	TOSHIBA / NB10-A114	APBD Kab.	14.100.000
31 6	1321001020 03	1 - 3	Note Book	2012	Core i5- 3210M (3.10GHz,3MB)	APBD Kab.	32.400.000
31 7	1321001020 03	5	Note Book / Ipad	2013	Samsung / Galaxy Tab 8"	Pembelian	5.500.000
31 8	1321001020 03	1	Note Book Dell Inspiron 5378 in I STARLORD 13 7100 W10HSL TOUCH	2018	Dell / Inspiron 5378 in I	Pembelian	10.600.000
31 9	1321001020 03	1	Samsung Tab S4 - Gray	2019	Samsung / GRAY	Pembelian	10.499.000
32 0	1321001020 03	1 - 7	Tablet	2020	Samsung / Tab A Plus 8	Pembelian	34.732.250
32 1	1321001020 10	1	Scanner	2018	CANON / LIDIE - 220	APBD Kab.	1.900.000
32 2	1321001030 01	1 - 3	UPS	2014	Power Ware / PW 5115	APBD Kab.	5.604.720
32 3	1321001030 01	1 - 2	UPS	2019	Prolink / Prolink 1500 VA	APBD Kab.	5.800.000
32 4	1321002010 12	1	Harddisk	2020	Portable / Seagate	APBD Kab.	755.000
32 5	1321002010 12	1 - 2	Harddisk Eksternal	2014	EXPANSION / HDD	APBD Kab.	2.300.000
32 6	1321002010 12	3	Harddisk Eksternal	2018	External 1 TB Seagate	APBD Kab.	775.000
32 7	1321002010 12	2	Harddisk Eksternal	2020	HD Ext	APBD Kab.	740.000
32 8	1321002010 12	2	Harddisk Eksternal	2019	Passport / WDC	APBD Kab.	770.000
32 9	1321002010 12	3	Harddisk Eksternal	2019	Seagate	Hibah	770.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
33 0	1321002010 12	1	Harddisk External	2019	Seagate	APBD Kab.	770.000
33 1	1321002010 12	1 - 2	Harddisk External	2018	Seagate	APBD Kab.	1.800.000
33 2	1321002010 12	4	Harddisk Memory	2018	TOSHIBA	APBD Kab.	2.500.000
33 3	1321002020 17	2 - 4	Printer	2011	WD	APBD Kab.	1.200.000
33 4	1321002020 17	1 - 2	Printer	2019	CANON PIXMA iP 2770	Pembelian	2.100.000
33 5	1321002020 17	1 - 6	Printer	2018	CANNON / iP 2770	APBD Kab.	13.395.360
33 6	1321002020 17	1	Printer	2020	Canon / E480	APBD Kab.	2.500.000
33 7	1321002020 17	4	Printer	2008	Canon / G3010	APBD Kab.	730.000
33 8	1321002020 17	1	Printer	2009	Canon	APBD Kab.	8.000.000
33 9	1321002020 17	1 - 2	Printer	2017	Dot Matrik A4,Tinta A3 CIS/Inf	APBD Kab.	5.800.000
34 0	1321002020 17	1	Printer	2010	Epson / L 360	APBD Kab.	2.100.000
34 1	1321002020 17	2	Printer	2008	EPSON	APBD Kab.	4.000.000
34 2	1321002020 17	1 - 6	Printer	2012	HP	APBD Kab.	3.900.000
34 3	1321002020 17	3 - 4	Printer Dot Matrix	2019	Inkjet	APBD Kab.	7.000.000
34 4	1321002030 02	1	Monitor	2014	Epson / LX310	APBD Kab.	7.500.000
34 5	1321002030 02	1	Monitor Display	2018	SAMSUNG / TV Plasma	APBD Kab.	6.200.000
34 6	1321002030 03	1 - 2	Printer	2014	Panasonic	Pembelian	1.450.000
34 7	1321002030 03	1	Printer	2019	Canon / iP 2770 Colour	APBD Kab.	1.143.453
34 8	1321002030 03	1 - 5	Printer	2016	Canon / IP2770	APBD Kab.	11.800.000
34 9	1321002030 03	2 - 4	Printer	2019	Epson / L220 Infus	APBD Kab.	8.456.547
35 0	1321002030 03	4	Printer	2014	Epson / L3110	APBD Kab.	5.000.000

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
35 1	1321002030 03	3	Printer	2014	HP / HP 200 Color M25N	APBD Kab.	1.400.000
35 2	1321002030 03	2 - 4	Printer Inkjet	2015	HP / Laser Jet HP 1102 Black	APBD Kab.	2.100.000
35 3	1321002030 03	1	Printer Laser Jet	2015	HP / P 1102	APBD Kab.	1.600.000
35 4	1321002030 03	1 - 3	Printer Scanner	2018	EPSON / L 350	APBD Kab.	8.700.000
35 5	1321002030 04	3	Scanner	2019	EPSON / DS- 50000	APBD Kab.	24.550.000
35 6	1321002030 04	1	Scanner Epson DS-50000	2018	Epson / DS- 50000	APBD Kab.	23.794.680
35 7	1321002030 04	2 - 3	Scanner Epson DS-6500	2018	Epson / DS- 6500	APBD Kab.	29.026.240
35 8	1321002030 04	1 - 2	Scanner F1 7180	2019	FUJITSU / PFU Limited	APBD Kab.	70.000.000
35 9	1321002030 07	1 - 2	Hardisk External	2019	Seagate / Expansion	APBD Kab.	1.694.000
36 0	1321002030 18	1	LCD Proyektor	2005	Toshiba	APBD Kab.	20.000.000
36 1	1321002030 18	1	Printer Scanner Copy	2015		APBD Kab.	3.000.000
36 2	1321002040 01	1 - 2	Server	2012	Intel Xeon Processor	APBD Kab.	47.500.000
36 3	1321002040 33	2	Jaringan/Instalasi Internet (Wireless)	2009		APBD Kab.	3.000.000
36 4	1321002040 33	2	Kabel UTP	2010	Tyco electronic / Campuran	APBD Kab.	935.000
36 5	1321002040 33	1	Peralatan Jaringan Komputer	2009	Toshiba	APBD Kab.	37.070.000
36 6	1321002040 33	1	Peralatan Jaringan Komputer	2011		APBD Kab.	1.500.000
36 7	1330101300 05	1	Kanopi Ruang Advis Planing	2012		APBD Kab.	5.000.000
36 8	1330101010 01	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2008		APBD Kab.	1.018.940.275
36 9	1330101120 04	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung MPP Kabupaten Banyumas	2023		APBD Kab.	14.357.850
37 0	1330101120 04	1	Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas	2017		APBD Kab.	10.170.267.730

No.	Kode Barang	Regist er	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type Judul/Asal/Je nis	Asal usul Cara Perolehan Barang	Harga Rp.
37 1	1340401030 02	1	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	2013		APBD Kab.	1.413.200
37 2	1340402020 04	1	Jaringan Aplikasi Perizinan Online	2015		APBD Kab.	82.874.000
37 3	1340402020 04	1	Instalasi Listrik	2009		Pembelian	49.700.000
37 4	1340402020 04	1	Jaringan Komputer SPIPISE	2011		Pembelian	18.370.000
37 5	1350101010 03	1	Buku Peraturan Perundang - Undangan	2009	-	APBD Kab.	172.500
37 6	1350101010 12	1	Buku Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012	2012	Buku Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012	APBD Kab.	145.000
37 7	1350101040 04	2	Buku Analisis Laporan Keuangan	2008	-	APBD Kab.	52.500
37 8	1350101040 04	1	Buku SAP	2008	-	APBD Kab.	1.600.000
37 9	1350101040 11	1	Buku Ilmu Sosial Lain - Lain	2009	-	APBD Kab.	119.000
38 0	1350101040 11	1	Buku Peraturan Perundang- undangan	2011	-	APBD Kab.	250.000
38 1	1350101040 11	2 - 3	Buku Peraturan Perundang undangan	2011	-	APBD Kab.	53.000
38 2	1350101040 11	1	Buku Peraturan Presiden No. 54	2012	Peraturan Presiden No. 54 Penerbit CV. MINI JAYA ABADI	APBD Kab.	108.000
JUMLAH							16.177.274.943

Sumber : KIB B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Januari Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan dapat dilihat dari capaian kinerjanya, berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas periode yang lalu, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu :

1. Nilai Investasi Daerah
2. Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Pertumbuhan Proyek Investasi Daerah
4. Persentase Penyelesaian Aduan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut semua indikator telah tercapai, sedangkan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Investorwalau telah melampaui target namun bila disandingkan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya cenderung mengalami penurunan tapi trendnya meningkat.

Indikator kinerja realisasi investasi selama periode renstra 4 indikator telah melampaui target, namun terkait indicator pertumbuhan proyek investasi perlu dilakukan Analisa lagi, dikarenakan indicator ini bias/absurd, sehingga tidak bisa menjadi tolok ukur kinerja.

Hasil secara lengkap dapat dilihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra						Realisasi			Capaian		
			2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 TW II	2019	2020	2021 TW II
1	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	255	250	500	545	600	600	761	1077,95	1021.56	298,43	414,6	204.31
2	Pertumbuhan proyek investasi daerah	%	NA	NA	1	1	1	1	NA	NA	15.01	NA	NA	74,57
3	Persentase pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal	%	NA	NA	70	75	80	80	NA	NA	0	NA	NA	0
4	Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	%	NA	NA	75	80	85	85	NA	NA	100	NA	NA	133,33
5	Persentase investor yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	NA	NA	85	88	90	90	NA	NA	87,97	NA	NA	154,61
6	Persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal	%	NA	NA	0	80	85	85	NA	NA	0	NA	NA	0
7	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	NA	NA	100	100	100	100	NA	NA	100	NA	NA	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra						Realisasi			Capaian		
			2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 TW II	2019	2020	2021 TW II
8	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	NA	NA	100	100	100	100	NA	NA	29,61	NA	NA	96,27
9	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100	96	NA	NA	100
10	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	NA	NA	100	100	100	100	NA	NA	100	NA	NA	100
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	NA	NA	88	89	90	90	88	89,5	89	88	89,5	105,4
12	Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)	%	90	90	90	90	90	90	90	94,39	100	100	104,88	111,11

Sumber: E-Monev Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja Utama

Indikator Program

Tabel 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Perubahan Indikator (Renstra Perubahan)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perubahan				Realisasi			Capaian			Keterangan
			2021	2022	2023	Akhir	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	500	545	600	600	1021.56	1662.45	0	204.31	137.53	NA	Telah melampaui target 2022 (545 M) dan target akhir Renstra (600 M)
2	Pertumbuhan proyek investasi daerah	%	1	1	1	1	74,57	87.42	0	7457	8742	NA	Telah melampaui target 2022 (1%) dan target akhir Renstra (1%)
3	Persentase pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	%	70	75	80	80	0	0	0	0	0	NA	Belum mencapai target 2022 (75%) dan target akhir Renstra (80%)
4	Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	%	75	80	85	85	100	100	0	133,33	125	NA	Telah melampaui target 2022 (80%) dan mencapai target akhir Renstra (85%)
5	Persentase investor yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	85	88	90	90	131,42	133,76	0	131,42	133,76	NA	Telah melampaui target 2022 (88%) dan target akhir Renstra (90%)
6	Persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal	%	0	80	85	85	0	100	0	0	125	NA	Telah melampaui target 2022 (80%) dan target akhir Renstra (85%)
7	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	0	100	100	NA	Telah mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perubahan				Realisasi			Capaian			Keterangan
			2021	2022	2023	Akhir	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
8	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	96,27	97,01	0	96,27	97,01	NA	Belum mencapai target 2022 (100%) dan target akhir Renstra (100%)
9	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	0	100	125	NA	Telah mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
10	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	0	100	100	NA	Telah mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	88	89	90	90	1233,23	98.12	0	1233,23	98.12	NA	Telah melampaui target 2022 (89%) dan target akhir Renstra (90%)
12	Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	0	100	100	NA	Telah mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
13	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)	%	90	90	90	90	111,11	111,11	0	111,11	111,11	NA	Telah melampaui target 2022 (90%) dan target akhir Renstra (90%)

Sumber: E-Monev Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

* Terdapat beberapa realisasi indikator belum publish pada saat disusunnya dokumen

Indikator Kinerja Utama

Indikator Program

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah masyarakat dan investor.

2.5. Tantangan dan Peluang

Dalam rangka pengembangan layanan sesuai dengan tugas fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menghadapi tantangan dan peluang.

2.5.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesesuaian penerapan kebijakan pusat dengan aplikasi di lapangan
2. Masih terjadi tarik ulur kewenangan dengan OPD teknis
3. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan
4. Tuntutan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang pesat

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang No, 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Adanya PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
3. Adanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2008 tentang

- Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
4. Adanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
 5. Adanya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
 6. Adanya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
 7. Adanya Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 8. Adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah.
 9. Adanya Peraturan Kepala BKPM No. 11 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
 10. Adanya Peraturan Kepala BKPM No. 12 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
 11. Adanya Peraturan Kepala BKPM No. 13 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 12. Adanya Peraturan Kepala BKPM No. 14 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
 13. Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 570 / 3727.A / SJ, Nomor : SE / 08 / M.PAN-RB / 9 / 2010, Nomor : 12 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010, perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
 14. Tersedianya fasilitas transportasi baik darat, maupun udara, hal ini dapat menunjang kelancaran arus barang dan jasa sehingga akan mengundang investasi.
 15. Adanya potensi sumber daya alam yang cukup besar dan luasnya wilayah, memungkinkan dibangun industri yang berbasis sumber daya alam (resources based industry) sehingga akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus membuka lapangan kerja secara luas.

16. Potensi investasi di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata dan manufaktur sebagai keunggulan daerah kompetitif dan hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan perkebunan.
17. Hilangnya penghalang perdagangan di seluruh dunia (Globalisasi) serta pasar digital akan bisa menjadi peluang besar jika bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu adalah sebagai berikut:

A. Masalah Pokok :

1. Investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Belum Optimalnya sistem pelayanan penanaman modal.

B. Masalah :

1. Belum optimalnya pelayanan penanaman modal.
2. Investasi yang ditawarkan masih kurang menarik minat investor.

C. Akar Masalah

1. Ketepatan waktu penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha yang belum sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Kegiatan Usaha yang memenuhi Kriteria belum memperoleh Insentif dan kemudahan berusaha.
3. Belum optimalnya pengendalian terhadap realisasi penanaman modal.
4. Belum optimalnya pengelolaan Data perizinan berusaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
5. Promosi investasi yang belum maksimal.

Dari permasalahan yang ada pada urusan penanaman modal dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah permasalahan OPD meliputi pokok masalah, masalah dan akar masalah dapat dipakai sebagai acuan kinerja yang akan dilakukan OPD dalam rangka pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Apakah dari permasalahan akan ada kesesuaian dengan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Apakah permasalahan OPD dapat menggambarkan pohon kinerja dan cascading kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tabel 6
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah OPD

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1. Belum Optimalnya pelayanan perizinan berusaha Pokin : Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha Indikator : Persentase Kegiatan Berusaha Berizin Formulasi : Kegiatan usaha berizin dibagi Jumlah kegiatan usaha dikali seratus persen Target : 2024 = 10% 2025 = 20% 2026 = 30% Tipe : Kumulatif Sumber Data : Data kegiatan usaha (Dinakerkop UKM), Data perizinan berusaha (DPMPTSP) Data Tahun 2021 Pembilang : Jumlah kegiatan usaha berizin = 8.696 buah Penyebut : Jumlah kegiatan usaha = 86.875 buah (Bidang PPM Sekko Kesra, Bidang PPM Sekbang dan Bidang Daldatin	1. Belum Optimalnya pelayanan perizinanberusaha Pokin : Mengoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal Indikator : persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan Formulasi : Jumlah perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan perizinan dikali seratus persen Target : 2024 = 96% 2025 = 96,5% 2026 = 97% Tipe : Non Kumulatif Sumber Data : Data rekapitulasi perizinan Pembilang : Jumlah perizinan terpadu satu pintu yg diterbitkan Penyebut :Jumlah	1. Ketepatan waktu penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha yang belum sesuaiwaktu yang ditetapkan Pokin : Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha Indikator : Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan Formulasi : Jumlah perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan dibagi jumlah perizinan berusaha dannon berusaha dikali seratus persen Target : 2024 = 99% 2025 = 99% 2026 = 99,5% Tipe : Non kumulatif Sumber data : Data penerbitan perizinanberusaha dan non berusaha Data Tahun 2021 Pembilang : Data penerbitan perizinan sesuaiwaktu = 19.800 buah Penyebut : Data penerbitan perizinan = 8.696 +9.280= 17.976 buah (Bidang PPM Sekko Kesra & Bidang PPM Sekbang)
2	1. Belum optimalnya Investasi yang berkualitasdan berkelanjutan Pokin : Meningkatnya investasi yang berkualitasdan berkelanjutan Indikator : Nilai Investasi Daerah	1. Investasi yang ditawarkan masih kurangmenarik minat investor Pokin : Meningkatnya pengendalian terhadap realisasi investasi	1. Kegiatan Usaha yang memenuhi Kriteria belum memperoleh Insentif dan kemudahan berusaha Pokin : Meningkatnya kegiatan usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Formulasi : Jumlah nilai Realisasi LKPM ditambah nilai realisasi investasi UMK Target : 2024 = 800 m 2025 = 1.600 m 2026 = 2.400 m Tipe : Non Kumulatif Data sumber : Realisasi investasi melalui LKPM dan realisasi investasi usaha mikro Data tahun 2021 dan 2020 Pembilang : Realisasi tahun 2020, 2021, 2022 tahun 2020 = 1.077.955.780.000 Tahun 2021 = 1.021.561.268.294,- Tahun 2022 = 1.662.456.999.547,-	Indikator : Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya Formulasi : Jumlah kegiatan usaha yang terealisasi investasinya dibagi jumlah kegiatan berijin dikali seratus persen Target : 2024 = 76% 2025 = 77% 2026 = 78% Tipe : Non kumulatif Data sumber : perijinan berusaha dan LKPM tahun 2021 Pembilang : kegiatan usaha yang terealisasi investasinya = 82 (inves baru) + 129 (tambahan inves) = 211 (usaha kecil, menengah besar) + 6.374 (perijinan / legalisasi usaha mikro) = 6.585 Penyebut = 8.696 (jumlah kegiatan usaha berijin) (Bidang Daldatin & Bidang PM seko ekonomi kesra, Bid PIPPM)	Indikator : Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan berusaha Formulasi : Jumlah Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal dibagi Jumlah kegiatan usaha yang diajukan untuk memperoleh Insentif dan kemudahan berusaha dikali seratus persen Target : 2024 = 50% 2025 = 100% 2026 = 100% Tipe: Non kumulatif Data sumber : target berdasar perbub minimal 2 kegiatan usaha mendapat insentif/kemudahan berusaha Pembilang: Jumlah kegiatan usaha yang memperoleh insentif dan atau kemudahan berusaha = NA Penyebut: Jumlah kegiatan usaha yang mengajukan Insentif dan atau kemudahan Penanaman Modal = 2 dikali seratus persen (Bidang PIPPM) 2. Belum optimalnya pengendalian terhadap realisasi penanaman modal Pokin : Meningkatnya pengendalian terhadap realisasi penanaman modal Persentase ke Indikator : Persentase realisasi investasi Formulasi: Realisasi investasi dibagi target investasi dikali seratus persen Target : 2024 = 95% 2025 = 96% 2026 = 97% Tipe : Non kumulatif Data sumber : realisasi investasi dan target investasi Data Tahun 2021 Pembilang : Realisasi investasi = 1.021 T

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Penyebut : Target investasi = 1,07 T (BKPM) RencanaTarget Kabupaten 2024 = 800 m 2025 = 800 m 2026 = 800 T (Bidang Daldatin) 3. Belum optimalnya pengelolaan Data perizinan berusaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pokin : Meningkatnya pengelolaan data perizinan berusaha dan LKPM Indikator : Persentase Data dan Informasi yang ter-update Formulasi: Jumlah Data dan Informasi yang terupdate secara periodik dibagi jumlah data dan informasi dikali seratus persen Target : 2024 = 100% 2025 = 100% 2026 = 100% Tipe : Non kumulatif Data sumber : Data informasi perijinan dan LKPM Pembilang : 2 (data informasi (data perijinan, non perijinan dan data LKPM) Penyebut : 2 data informasi (Bidang Daldatin) 4. Promosi investasi yang belum maksimal Pokin : Meningkatnya promosi investasi Indikator : Persentase Calon Investor yang menerima promosi/ terfasilitasi penanaman modal yang membuat LoI Formulasi : Jumlah Calon Investor yang membuat LoI dibagi jumlah calon Investor yang menerima promosi/ terfasilitasi penanaman modal dikali seratus persen Target : 2024 = 50% 2025 = 60% 2026 = 70% Tipe : Non kumulatif Sumber data : data LoI tahun 2021 Pembilang : 4 LoI Penyebut : Calon investor menerima promosi/fasilitasi penanaman modal = 24 calon investor (Bidang PIPPM)

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM

Visi BKPM : “Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”.

Misi BKPM :

1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Rencana Strategis BKPM:

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan Rencana Strategis BKPM:

- 1) Nilai Realisasi Penanaman Modal;
- 2) Nilai Realisasi Penanaman Modal sektor sekunder;
- 3) Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa);
- 4) Kontribusi investasi dalam negeri/ PMDN termasuk UMKM;

Arah kebijakan dan strategi BKPM RI, ada dua yaitu:

pertama menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan kedua meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penciptaan iklim penanaman modal yang berdaya saing ditujukan untuk meningkatkan penanaman modal secara umum melalui pemberian kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan kepastian hukum.

Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkualitas Dan Berkelanjutanditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk

memperbaiki kinerja ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan lingkungan.

Arah

Kebijakan

Penanaman

..

Modal

dalam

Mendukung

A

Hilirisasi Investasi Strategis dan Green Investment (Investasi Lestari)

Direktur Perencanaan Infrastruktur 1 Maret 2023





5 Agenda Besar Indonesia Maju :

1. Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam
2. Optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau
3. Perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat
4. UMKM naik kelas
5. Pembangunan Ibu Kota Nusantara



Kesepakatan negara G20 terhadap isu investasi :

1. Pentingnya investasi berkelanjutan dan inklusif untuk pemulihan ekonomi;
2. Pentingnya kebijakan yang terkoordinasi dan strategis dalam mendorong investasi dan penyederhanaan prosedur administrasi investasi;
3. Pentingnya mendorong nilai tambah, salah satunya melalui hilirisasi, serta memperkuat keterkaitan antara investor asing dengan UMKM;
4. Pentingnya iklim pembiayaan investasi yang kondusif dalam rangka mendorong investasi berkelanjutan yang adil dan merata, khususnya negara-negara berkembang; serta
5. Pentingnya penyusunan Kompendium Bali sebagai kompilasi praktik-praktik dan inisiatif-inisiatif baik dari negara-negara anggota G20 dalam menerapkan investasi berkelanjutan.

Konsep Investasi Lestari

Tujuan

Panduan investasi lestari telah disusun dan disesuaikan dengan level bisnis, entitas korporasi, investor, dan pemerintah. Adapun tujuan panduan investasi lestari tersebut diantaranya:

Bagi pelaku usaha:

- Memberikan instrumen dalam **mentransformasikan usaha** mereka menjadi usaha yang berkelanjutan, dengan menempatkan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tatakelola dalam proses bisnisnya
- Mengidentifikasi **aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang masih menjadi kendala**, untuk kemudian dicarikan **solusi yang efektif** untuk menangani kendala tersebut
- Meningkatkan **nilai perusahaan** dalam lanskap investasi berkelanjutan

Bagi Investor:

- Memberikan instrumen dalam **mengidentifikasi pelaku usaha** yang telah memenuhi kriteria keberlanjutan dalam lingkungan, sosial dan tata Kelola
- Memberikan **insight dalam menyusun perencanaan** investasi jangka menengah dan panjang
- **Mentranslasikan proses bisnis yang berkelanjutan** dalam perspektif investor

Bagi Pemerintah:

- Membuka peluang **meningkatnya investasi** di Indonesia, khususnya yang investasi **berkelanjutan** baik dari dalam negeri maupun luar negeri
- Meningkatkan **daya saing dunia usaha Indonesia** terhadap luar negeri, khususnya dalam hal usaha/bisnis yang berkelanjutan.

Berdasarkan informasi diatas orientasi investasi diarahkan pada investasi yang lestari dan hilirisasi produk, yaitu bahwa bahan mentah diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan nilai tambah.

Tabel 7

Permasalahan Pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Banyumas Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPSTSP Kab.Banyumas	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	1. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal 2. Meningkatkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	-Terbatasnya ketersediaan lahan dalam kawasan atau peruntukan industri sehingga calon investor sering kesulitan untuk mendapatkan lokasi usaha yang ideal -Belum disusunnya strategy promosi, untuk meningkatkan minat calon investor	Pemerintah selalu mendorong penciptaan iklim penanaman modal yang berdaya saing melalui pemberian insentif dan kemudahan berusaha, kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi dan meningkatkan kepastian hukum,
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal			
	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM			
	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal			
	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal			
	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas			

3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pembangunan Jawa Tengah yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu Misi Ke-2 : Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Misi Ke-3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jawa Tengah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal yang menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.



Isu Strategis Jawa Tengah 2024 - 2026

ISU UTAMA

Kesejahteraan masyarakat
(terkait kemiskinan, pendapatan
per kapita, dan ketimpangan)

Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Tantangan kondisi global, inflasi dunia, potensi sektor unggulan, investasi, ekspor, konsumsi masyarakat berpengaruh pada NTP dan TPT

Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Adaptif

Tantangan daya saing SDM, jumlah penduduk yang meningkat berpotensi menimbulkan masalah ekonom dan sosial, SDM berkarakter

Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung menurun, perubahan iklim, risiko bencana tinggi

Tata Kelola Pemerintah yang Dinamis

RB berorientasi pada dampak, digitalisasi layanan publik, pemerintahan yang kolaboratif



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024-2026

Sasaran 1

Meningkatnya Perekonomian
Tangguh yang Berdaya Saing
dan Berkelanjutan

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Sumber
Daya Manusia yang Berdaya
Saing, Berkarakter, & Adaptif

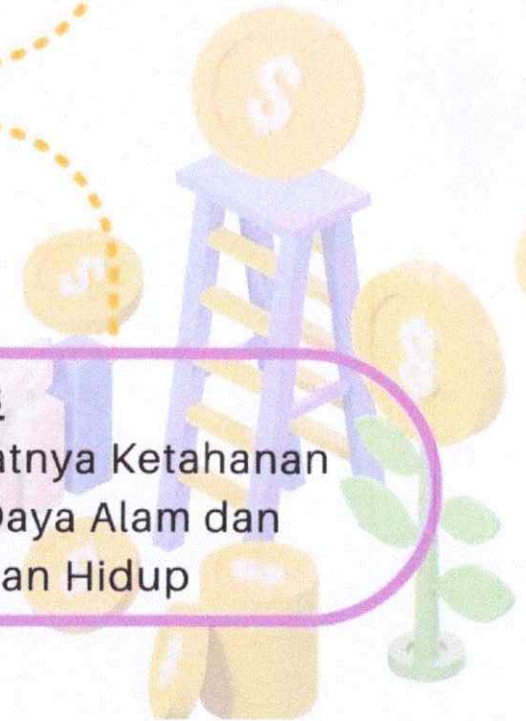
TUJUAN PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
"Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera
dan Lestari"

Sasaran 4

Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang
Dinamis

Sasaran 3

Meningkatnya Ketahanan
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup





ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

2024

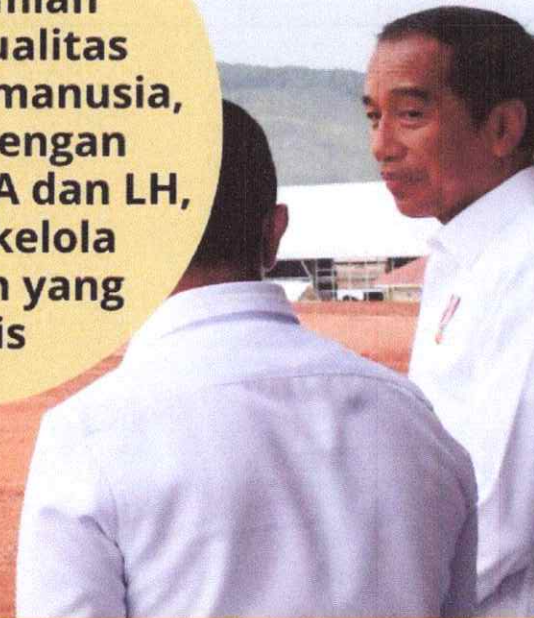
Peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas

2025

Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan SDM yang semakin berkualitas dan berkarakter

2026

Penguatan perekonomian tangguh, kualitas sumber daya manusia, didukung dengan ketahanan SDA dan LH, serta tata kelola pemerintah yang dinamis





POKOK-POKOK PIKIRAN



Optimalisasi aset daerah dan sektor unggulan untuk mendukung investasi Jawa Tengah



Hilirisasi investasi sektor unggulan (pertanian dan perikanan)



Promosi investasi sektor unggulan



Sinergi pengembangan investasi pemerintah dengan dunia usaha (KPBU, PPP, dsb)



Penguatan kerja sama investasi berbasis sektor unggulan dengan provinsi sekitar



Berdasarkan informasi diatas untuk wilayah Barlingmascakeb diarahkan pada investasi berbasis sector unggulan perikanan, pertanian, minyak dan gas, batik, furniture, logam, perdagangan dan pariwisata.

Sedangkan pokok-pokok pikiran dalam investasi adalah :

- Optimalisasi asset dan sector unggulan untuk mendukung investasi Jatenf
- Hilirasi investasi sector unggulan (pertanian dan perikanan)
- Promosi investasi sector unggulan
- Sinergi pengembangan investasi pemerintah dengan dunia usaha
- Penguatan Kerjasama investasi berbasis sector unggulan dengan propinsi sekitar

Tabel 8

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyumas Berdasarkan Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perizinan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal	Keterbatasan anggaran dan kolaborasi program antar OPD yang belum sesuai, sehingga belum optimal dalam mendukung kinerja propinsi	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah selalu melakukan sinkronisasi Program/ Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, sehingga DPMPTSP Kabupaten Banyumas apabila anggaran memungkinkan dapat mendukung dan menyesuaikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal PMA dan PMDN	2. Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan		

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagai SKPD yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelayanan perijinan untuk dimulainya kegiatan usaha dan penanaman modal harus senantiasa mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2031.

Dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tersebut Dijelaskan bahwa Kawasan peruntukan industri sebagai mana di maksud dalam pasal 33 huruf g terdiri atas :

3. Industri besar dan menengah seluas kurang lebih 580 Hektar meliputi di wilayah
 - a. Kecamatan Kemranjen
 - b. Kecamatan Sokaraja
 - c. Kecamatan Wangon
 - d. Kecamatan Ajibarang
4. Industri Besar dan Menengah yang menggunakan bahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dikembangkan di wilayah :
 - a. Kecamatan Karanglewas
 - b. Kecamatan Kedungbanteng
 - c. Kecamatan Baturaden
 - d. Kecamatan Sumbang
 - e. Kecamatan Kembaran
 - f. Kecamatan Jatilawang
 - g. Kecamatan Purwojati
 - h. Kecamatan Rawalo
 - i. Kecamatan Patikraja
 - j. Kecamatan Tambak
 - k. Kecamatan Kebasen
 - l. Kecamatan Kalibagor
 - m. Kecamatan Banyumas
 - n. Kecamatan Somagede

- o. Kecamatan Sumpiuh
- p. Kecamatan Perwokerto Utara
- q. Kecamatan Purwokerto Timur
- r. Kecamatan Purwokerto Selatan dan
- s. Kecamatan Purwokerto Barat.

Tabel 9

**Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Telaahan RTRW Kabupaten Banyumas
Tahun 2011 – 2031**

No	Rencana RTRW terkait Tupoksi DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Kawasan Peruntukan Industri	Pemohon ijin Penanaman Modal sering kali tidak memahami tentang pembagian kawasan peruntukkan industri yang sesuai dengan jenis usahanya, sehingga pada saat mengajukan ijin akan ditolak dengan alasan wilayah/kawasan yang dimohon tersebut tidak sesuai dengan peruntukan industri / usahanya	Kurangnya publikasi/informasi terkait dengan peruntukan wilayah RTRW	DPMPTSP Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelayanan kepada calon investor akan selalu berpedoman kepada RTRW agar investasi sesuai dengan wilayah/kawasan peruntukan usahanya

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal
2. Peningkatan Investasi Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024–2026 yang menjadi tugas Bappedalitbang Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal;
2. Meningkatkan Investasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Bappedalitbang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal
2. Meningkatnya Kegiatan Usaha yang Terealisasi Investasinya.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 10 sebagaimana berikut ini.

Tabel 10
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2022	2024	2025	2026	s/d 2026
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal		IKM pelayanan terpadu satu pintu	IKM pelayanan terpadu satu pintu	Nilai	87,33	90,5	90,75	91	91
	Mengoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal	persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan	Jumlah perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan perizinan terpadu satu pintu x 100%	%	NA	96	96,5	97	97
Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan		Nilai Investasi Daerah	Jumlah nilai Realisasi LKPM ditambah nilai realisasi investasi UMK	Milyar Rupiah	1.662,45	800	1600	2400	2400
	Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	Jumlah kegiatan usaha yang terealisasi investasinya dibagi jumlah kegiatan berijin dikali seratus persen	%	NA	76	77	78	78

Sumber: e RPD Tahun 2024-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 3 (tiga) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan untuk peningkatan kinerja pelayanan public melalui pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu.
2. Melakukan upaya peningkatan ketepatan waktu pelayanan perizinan melalui perbaikan mekanisme pelayanan perizinan
3. Melakukan upaya peningkatan realisasi investasi daerah untuk perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif, peningkatan kualitas promosi penanaman modal, peningkatan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
4. Melakukan upaya agar kegiatan usaha dapat direalisasikan investasinya melalui bantuan dalam penyelesaian atas kendala serta bantuan dalam pembuatan laporan realisasi investasi.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu melalui peningkatan jenis sarpras layanan baik kualitas maupun kuantitasnya, peningkatan kapasitas SDM layanan serta peningkatan atas inovasi layanan
2. Melakukan perbaikan mekanisme pelayanan perizinan melalui

- perbaikan atas standar operasional prosedur termasuk dengan OPD mitra serta penerapan antrian secara online
3. Melakukan pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif melalui penyelesaian investasi yang mangkrak, peningkatan pemberian insentif dan atau kemudahan berusaha melalui upaya jemput bola terhadap investasi yang memenuhi kriteria, peningkatan pemetaan potensi investasi melalui kajian-kajian serta pemetaan lahan investasi, peningkatan kualitas promosi penanaman modal melalui diversifikasi kegiatan promosi serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha secara kontinyu.
 4. Melakukan bantuan dalam penyelesaian atas kendala realisasi investasi serta bantuan dalam pembuatan laporan realisasi investasi melalui peningkatan aktifitas bantuan atas penyelesaian kendala dan laporan investasi kepada para pelaku usaha

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 11 :

Tabel 11
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Isu Strategis Kab. :	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Penanggulangan Kemiskinan
Tujuan Kab. :	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing 2. Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan SDM
Sasaran Kab. :	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Kolaboratif 2. Meningkatkan kesempatan kerja
Prioritas Kab. :	1. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif 2. Peningkatan Investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan
Permasalahan Urusan Penanaman Modal Kab. :	1. Ketepatan waktu penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan 2. Investasi yang ditawarkan belum menarik minat investor
Strategy Kab. :	1. Strategy dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerinthan yang efektif dan kolaboratif : a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui menyelenggarakan dan atau memfasilitasi keikutsertaan ASN dalam diklat dan bimtek, maupun melanjutkan Pendidikan b. Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui peningkatan kualitas tata kelola TIK, peningkatan pemenuhan standar pelayanan, dan penerapan inovasi dalam tata Kelola pemerintahan c. Penerapan manajemen perubahan serta penataan kelembagaan dan

proses bisnis organisasi melalui peningkatan kualitas pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas perencanaan. 2. Strategy dan arah kebijakan peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan : a. Meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memperbaiki iklim investasi untuk menarik investasi, pasar dan bisnis (pro growth) b. Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan melalui pemberian insentif investasi, kemudahan perizinan, peningkatan promosi, pengendalian pelaksanaan, dan pengembangan iklim investasi, pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan pelayanan perijinan serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.
Isu Strategis OPD : 1. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal 2. Peningkatan investasi daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal;	1. Mengoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal	1. Melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan untuk peningkatan kinerja pelayanan public melalui pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu. 2. Melakukan upaya peningkatan ketepatan waktu pelayanan perizinan melalui perbaikan mekanisme pelayanan perizinan	1. Melakukan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu melalui peningkatan jenis sarpras layanan baik kualitas maupun kuantitasnya, peningkatan kapasitas SDM layanan serta peningkatan atas inovasi layanan 1. Melakukan perbaikan mekanisme pelayanan perizinan melalui perbaikan atas standar operasional prosedur termasiuk dengan OPD mitra serta penerapan antrian secara online
2	Meningkatkan Investasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kegiatan Usaha yang Terealisasi Investasinya	1. Melakukan upaya peningkatan realisasi investasi daerah untuk perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif, pemberian insentif dan atau kemudahan berusaha, peningkatan pemetaan potensi investasi, peningkatan kualitas promosi penanaman	1. Melakukan pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif melalui penyelesaian investasi yang mangkrak, peningkatan pemberian insentif dan atau kemudahan berusaha melalui upaya jemput bola

			modal, serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	terhadap investasi yang memenuhi kriteria, peningkatan pemetaan potensi investasi melalui kajian-kajian serta pemetaan lahan investasi, peningkatan kualitas promosi penanaman modal melalui diversifikasi kegiatan promosi serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha secara kontinyu
			Melakukan upaya agar kegiatan usaha dapat direalisasikan investasinya melalui bantuan dalam penyelesaian atas kendala serta bantuan dalam pembuatan laporan realisasi investasi.	Melakukan bantuan dalam penyelesaian atas kendala realisasi investasi serta bantuan dalam pembuatan laporan realisasi investasi melalui peningkatan aktifitas bantuan atas penyelesaian kendala dan laporan investasi kepada para pelaku usaha

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas

Tabel 12
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					12.868.778.000		13.166.214.000		13.853.842.000		39.888.834.000
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	IKM pelayanan terpadu satu pintu	%	progres positif	90,5	224.500.000	90,75	224.500.000	91	224.500.000	91	224.500.000
Mengoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal	persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan	%	progres positif	96	224.500.000	96,5	224.500.000	97	224.500.000	97	224.500.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%	progres positif	96	224.500.000	96,5	224.500.000	97	224.500.000	97	224.500.000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sektor perekonomian kesra dan sektor Pembangunan	SK	akumulatif	10000	224.500.000	10000	224.500.000	10000	224.500.000	30000	673500000
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	akumulatif	10000	132.000.000	10000	132.000.000	10000	132.000.000	30000	396.000.000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Kegiatan Usaha	akumulatif	24	52.500.000	24	52.500.000	24	52.500.000	72	157.500.000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026			
				Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	akumulatif	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	60.000.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	akumulatif	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	600	600.000.000
Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	Progres positif	800	8.090.752.000	1600	8.282.942.000	2400	8.686.550.000	2400	8.686.550.000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026			
				Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	%	progres positif	76	8.090.752.000	77	8.282.942.000	78	8.686.550.000	78	8.686.550.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	%	progres positif	50	112.500.000	100	80.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas insentif PM	Dokumen	akumulatif	2	7.500.000	2	15.000.000	2	15.000.000	6	37.500.000
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	akumulatif	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Kegiatan Usaha	akumulatif	2	7.500.000	2	15.000.000	2	15.000.000	6	37.500.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dalam peta potensi yang telah dikaji	Dokumen	akumulatif	3	105.000.000	3	65.000.000	3	50.000.000	9	220.000.000
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah Perda Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Dokumen	akumulatif	1	65.000.000	1	25.000.000	0	0	2	90.000.000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten Kota	Dokumen	akumulatif	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	8	130.000.000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	%	progres positif	95	393.000.000	96	393.000.000	97	393.000.000	97	393.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha dan Kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah pembinaan dan pengawasan	Buah	akumulatif	278	393.000.000	278	393.000.000	278	393.000.000	834	1.179.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan usaha	akumulatif	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha dan Kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah pembinaan dan pengawasan	Pelaku usaha	akumulatif	262	338.000.000	262	338.000.000	262	338.000.000	786	414.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan usaha	akumulatif	19	55.000.000	19	55.000.000	19	55.000.000	19	165.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	%	progres positif	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang disajikan di website	Buah	akumulatif	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	12	60.000.000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	akumulatif	3	5.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	9	25.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	akumulatif	3	5.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	9	25.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	akumulatif	4	4.065.000.000	4	4.165.000.000	4	4.190.000.000	12	12.420.0.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Orang/Bulan	akumulatif	12	4.000.000	12	4.100.000	12	4.125.000	36	12.225.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Orang	akumulatif	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	36	195.000.000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	akumulatif	12	848.252.000	12	923.000.000	12	980.000.000	36	2.751.252.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Jenis	akumulatif	15	8.000.000	15	8.000.000	15	10.000.000	45	26.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Jenis	akumulatif	4	50.252.000	4	65.000.000	4	75.000.000	12	190.252.000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Jenis	akumulatif	20	15.000.000	20	15.000.000	20	25.000.000	60	55.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	akumulatif	12	350.000.000	12	360.000.000	12	375.000.000	36	1.085.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Buah	akumulatif	20000	50.000.000	20000	60.000.000	20000	65.000.000	60000	175.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Kali	akumulatif	200	350.000.000	200	390.000.000	200	405.000.000	600	1.145.000.000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen yang diarsipkan	Berkas	akumulatif	2400	25.000.000	2400	25.000.000	2400	25.000.000	7200	75.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	akumulatif	2	184.000.000	2	197.000.000	2	364.550.000	6	745.550.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	progres positif	20	109.000.000	30	112.000.000	40	200.000.000	100	421.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	progres positif	3	75.000.000	4	85.000.000	5	164.550.000	5	164.550.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	akumulatif	2	1.965.000.000	2	2.015.000.000	2	2.077.000.000	6	6.057.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang	Bulan	akumulatif	12	250.000.000	12	250.000.000	12	262.000.000	36	762.000.000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Air dan Listrik	tersedia										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	akumulatif	39	1.715.000.000	39	1.765.000.000	39	1.815.000.000	117	5.295.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	akumulatif	4	336.000.000	4	352.942.000	4	475.000.000	12	1.163.942.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan barang gedung milik daerah yang dilaksanakan	Unit	progres positif	11	110.000.000	11	125.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan barang gedung milik daerah yang dilaksanakan	Unit	progres positif	66	100.000.000	66	100.000.000	66	125.000.000	66	125.000.000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan barang gedung milik daerah yang dilaksanakan	Unit	progres positif	2	76.000.000	2	77.942.000	2	100.000.000	2	100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan barang gedung milik daerah yang dilaksanakan	Unit	progres positif	2	50.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Banyumas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Kabupaten Banyumas 2024-2026

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2022	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	IKM pelayanan terpadu satu pintu	%	87,33	90,5	90,7 5	91	91
2.	Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	1.662,4 5	800	1600	2400	2400
3	Mengoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal	Persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan	%	NA	96	96,5	97	97
4	Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	%	NA	76	77	78	78

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 Perubahan merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 3 (tiga) tahun berikutnya.

Penyusunan Renstra Peralihan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Setiap bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik- baiknya.
2. Seluruh ASN pada setiap bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra peralihan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas



IRAWATI, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650126 199003 2 005